

ABSTRAK

Anisa Yuliani: “KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH DERET (Studi Analisis Konflik Sosial di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung)”.

Penelitian ini membahas tentang konflik sosial Pembangunan Rumah Deret. Studi kasus yakni terkait pembangunan rumah deret di RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Konflik yang terjadi karena perbedaan pemahaman antara warga RW 11 Tamansari dengan Pemerintah Kota Bandung. Bermula dari diterbitkannya Perwal No. 665 Tahun 2017 perihal relokasi sementara warga yang terkait proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penolakan warga RW 11 Tamansari terhadap program pembangunan rumah deret yang menyebabkan konflik sosial dan menganalisis peranan kekuasaan dalam program pembangunan rumah deret di Kelurahan Tamansari serta untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian konflik sosial.

Teori yang digunakan adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf, dimana konflik sosial yang terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda dalam suatu kelompok sehingga menciptakan kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik sosial. Masyarakat sebagai pihak yang dikuasai (subordinat) dan Pemerintah Kota Bandung merupakan pihak yang menguasai (superordinat).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan mengenai kondisi dan bagaimana penolakan yang dilakukan oleh warga RW 11 Tamansari serta bagaimana peranan kekuasaan Pemerintah Kota Bandung dan upaya dalam menyelesaikan konflik sosial pembangunan rumah deret di Tamansari.

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa warga RW 11 Tamansari terpecah menjadi tiga kelompok; Pertama, warga yang menyetujui pembangunan rumah deret sejak 2017 yang mendapatkan kompensasi 20% dari NJOP. Kedua, warga yang masih bertahan di Mesjid Al-Islam dan mereka mendapatkan uang sewa sebesar 26 juta. Ketiga, hanya tersisa satu rumah yang masih berjuang dan bertahan di lahan pembangunan rumah deret. Pembangunan rumah deret merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan permukiman yang layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah karena terbatasnya lahan perkotaan untuk pembangunan perumahan. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pertanahan Kota Bandung merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam program pembangunan rumah deret. Upaya penyelesaian konflik dengan cara mediasi.